

SEKRETARIAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUB BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

JL. MGR. SOEGIJOPRANOTO NO. 1 SEMARANG 50131

 SUB BAGIAN KEUANGAN DPMPSTP PROVINSI JAWA TENGAH		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh Kepala DPMPSTP Nama SOP : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD								
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal; 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 152 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 152); 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 74); 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 18)		Kualifikasi pelaksana 1. Pendidikan minimal SLTA 2. Memiliki Pengetahuan tentang Perbendaharaan 3. Memiliki kemampuan teknis 4. Memiliki integritas								
Keterkaitan 1. Peta Jabatan 2. SOP Pengukuran Beban Kerja		Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Jaringan internet 5. Peraturan dan Pedoman terkait SOP								
Peringatan Jika SOP Analisis jabatan tidak disusun, maka hasil analisis yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan		Pencatatan dan Pendataan 1. Analisis jabatan disusun oleh pegawai yang bersangkutan								
No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Staf Keuangan	Kasubag Keuangan	Sekretaris	TU PIMPINAN	Kepala DPMPSTP	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Membuat Laporan Operasional (Manual)						SPJ Fungsional; Perda No 8 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016		Laporan Operasional (Manual)	

2	Membuat Laporan Realisasi Anggaran Setelah Konversi (Manual)					SPJ Fungsional; Perda No 8 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017	Laporan Realisasi Anggaran Setelah Konversi (Manual)	
3	Membuat Neraca					Saldo Awal 2017 (Audited) dari BPKAD Bidang Akuntansi; Laporan	Neraca	
4	Membuat Laporan Ekuitas					Saldo Awal 2017 (Audited) dari BPKAD Bidang Akuntansi; Laporan Aset Tetap, Aset Lainnya, Penyusutan dan Amortisasi dari Pengurus Barang	Laporan Perubahan Ekuitas	
5	Membaca CaLK					SPJ Fungsional; Perda No 8 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016; Saldo Awal 2017 (Audited) dari BPKAD Bidang Akuntansi; Laporan Aset Tetap, Aset Lainnya, Penyusutan dan Amortisasi dari Pengurus Barang	CALK	
6	Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD						Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

- Keterangan:
- Start/Akhir Proses
 - Proses
 - Pengambilan Keputusan
 - Dokumentasi
 - Alur Proses Kegiatan
 - Proses Kembali
 - Lanjut/Perpindahan aktifitas halaman
 - Soft copy

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal

DIDIK SUBIYANTORO